RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2023

DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

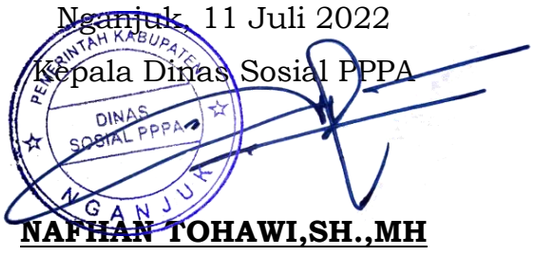
KABUPATEN NGANJUK

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga dapat tersusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD bahwa penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun Anggaran 2023 disusun 6 bulan sebelum tahun rencana. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini masih banyak kekurangan untuk itu dapat diberikan masukan berupa saran dan kritik yang bermanfaat guna penyempurnaan lebih lanjut, sehingga semua yang tertuang di dalamnya dapat terwujud sepenuhnya dengan baik.

Nganjuk, 11 Juli 2022
Kepala Dinas Sosial PPPA



NAFHAN TOHAWI,SH.,MH
NIP. 19721208 199803 1 005
Pembina Utama Muda

DAFTAR ISI

SAMPUL HALAMAN i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... iii

DAFTAR TABEL..... iv

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan.....8

1.4 Sistematika Penulisan 9

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 11

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....26

2.3 Isu-Isu PentingPenyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 30

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....34

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 41

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 64

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD 64

3.3 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada SIPD 66

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Prioritas Pembangunan Daerah 83

4.2 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.....83

4.3 Belanja Hibah, Bnatuan Sosial dan Bantuan Keuangan Khusus.....123

V PENUTUP

5.1 Catatan Penting 125

51.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan.....125

5.3 Rencana Tindak Lanjut 126

DAFTAR TABEL

1. Tabel. 1 T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 13
2. Tabel 2. Indikator Kinerja Utama 26
3. Tabel 3 Indikator Kinerja Kunci 27
4. Tabel 4. T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial PPPA Kabupaten Nganjuk..... 28
5. Tabel 5. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat dalam Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 33
6. Tabel. 6 T-C.31 Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2023 Kabupaten Nganjuk 42
7. Tabel. 7 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan RKPD Tahun 2023..... 66
8. Tabel. 8 T-C. 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Dinas Sosial PPPA Kabupaten Nganjuk 99

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023, Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan tetap berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 - 2023, hasil evaluasi Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk tahun lalu dan tahun berjalan.

Sejalan dengan kebijakan Pemerintah Propinsi Jawa Timur, tolok ukur kinerja pembangunan dilakukan melalui “Nawa Bhakti Satya” yang diintegrasikan ke dalam Program Perangkat Daerah. Konteks perencanaan pembangunan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/ memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Nganjuk dituntut untuk siap dan sanggup membuat/ menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Proses penyusunan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 didasarkan kepada Review Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 dengan tetap memperhatikan Program Prioritas Pembangunan Jangka Menengah yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Tahun 2023, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan terwujud konsistensi antar dokumen perencanaan.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk disusun atas dasar

a. Landasan Idiil : Pancasila

b. Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945

c. Landasan Operasional :

1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) Sebagaimana telah dengan undand-undang Nomor 2 tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi,Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419;
10. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

11. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
14. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
15. Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentangPenanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
16. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentangPenataan Ruang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
17. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
18. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

19. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
20. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405)
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578)
25. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663)
27. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala daerah kepada DPRD dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693)

28. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007tentangPembagian Urusan Antara Pemerintah ; Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741)
29. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815)
30. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
31. Peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
32. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
33. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014.
34. Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2010tentang Program Pembangunan Berkeadilan.
35. Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
36. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencana Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 tahun 2010, Nomor : 0199 / m ppn/04/2010; Nomor pmk 95/ pmk 07/ 2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 – 2014.

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
38. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan dasar Pada Standar Pelayanan minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
40. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
41. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
42. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025;
43. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 05 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Timur Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 seri D);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);

45. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten nganjuk Tahun 2020 Nomor 8);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 Nomor 8);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 – 2023.

1.3.Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 adalah menyediakan acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2023.

Tujuannya adalah agar dokumen perencanaan yang disusun dapat dijadikan acuan berbagai pihak yang akan melakukan aktivitas di Kabupaten Nganjuk, sehingga terwujud senergitas antar dokumen perencanaanan.

1.4.Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2023, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. Keputusan Kepala OPD tentang Penetapan Renja OPD
2. Kata Pengantar
3. **BAB I. PENDAHULUAN**

   Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah, Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2.Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dengan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten. Meskipun sejumlah kebijakan yang bersifat pengaturan telah dibuat untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan Daerah Provinsi dan perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota antara lain oleh kebijakan perencanaan yang tertuang dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang dikenal sebagai proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 tahun 2016 Tanggal 25 Oktober 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nganjuk Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang merupakan pejabat eselon II, dibantu oleh sekretaris dan empat Kepala Bidang yang masing-masing merupakan Pejabat Eselon III.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut.

Tugas Pokok : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Sosial,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Fungsi :

1. Perumusan Kebijakan teknis di bidang sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang sosial, pemberdayaan sosial dan Perlindungan anak;
3. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Renstra 2018-2023 dan hasil evaluasi pelaksanaan Renja, disajikan data hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2021 dalam Tabel T-C.29.

Tabel 1. T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020 (n-3)	Target Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022 n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar							Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar		
1.06	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial							Urusan Pemerintahan Bidang Sosial		
1.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu								
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	95%	100%	100%	100%	100%	295%	74%
1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD	100%	95%	100%	100%	100%	100%	295%	74%

1.06.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terwujudnya administrasi keuangan**	**93%**	**99%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**299%**	**75%**
1.06.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terpenuhinya monitoring evaluasi pelaporan koordinasi dan konsultasi dalam daerah	80%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	75%
1.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	100%	98%	100%	100%	100%	100%	298%	75%
1.06.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran	Tersusunnya laporan keuangan semesteran	100%	99%	100%	100%	100%	100%	299%	75%
1.06.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terwujudnya administrasi kepegawaian**	**100%**	**97%**	**85%**	**84%**	**99%**	**100%**	**281%**	**70%**
1.06.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya diklat/ bimtek bagi aparatur	100%	97%	85%	84%	99%	100%	281%	70%
		Terlaksananya senam kesegaran jasmani bagi PNS								
1.06.01.2.06	**Administrasi Umum**	**Terwujudnya administrasi umum**	**90%**	**77%**	**85%**	**84%**	**99%**	**100%**	**261%**	**65%**
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan kantor serta meningkatnya kenyamanan kerja	80%	99%	85%	85%	100%	100%	284%	71%
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya pengadaan alat tulis kantor yang memadai	100%	66,5%	85%	85%	100%	100%	252%	63%
		Tersedianya makan minum untuk karyawan								

1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	80%	99%	85%	85%	100%	100%	284%	71%
1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya pembayaran surat kabar atau majalah	80%	100%	85%	85%	100%	100%	285%	71%
1.06.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makan minum untuk tamu	100%	33%	85%	85%	100%	100%	218%	55%
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tercukupinya biaya perjalanan dinas Tersedianya makan minum untuk rapat dinas	100%	64%	85%	78%	92%	100%	242%	61%
1.06.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terwujudnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**87%**	**98,67%**	**85%**	**85%**	**100%**	**100%**	**284%**	**71%**
1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya pengiriman surat menyurat dan belanja materai	85%	96%	85%	85%	100%	100%	281%	70%
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya kebutuhan sumber daya listrik, telfon, dan air	85%	100%	85%	85%	100%	100%	285%	71%
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya jasa kebersihan kantor	90%	100%	85%	85%	100%	100%	285%	71%
1.06.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terwujudnya pemeliharaan barang milik daerah**	**97,67%**	**100%**	**85%**	**85%**	**100%**	**100%**	**285%**	**71%**
1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	100%	100%	85%	85%	100%	100%	285%	71%
1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	93%	100%	85%	85%	100%	100%	285%	71%

		Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor								
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	100%	100%	85%	85%	100%	100%	285%	71%
		Terlaksananya rehab gedung kantor								
1.06.02	**Program Pemberdayaan Sosial**	**Persentase PSKS yang aktif**						**85%**	**85%**	**21%**
1.06.02.2.03	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Terwujudnya pemberdayaan sosial**	**85%**	**58%**	**85%**	**78%**	**92%**	**85%**	**221%**	**55%**
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat (PSM, TKSK, dan pemberdayaan Karang Taruna)	85%	46,0%	85%	75%	88%	85%	206%	52%
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya peningkatan jejaring kerjasama pelaku - pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	85%	62%	85%	85%	100%	85%	232%	58%
		Terlaksananya peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat (PSM, TKSK, dan pemberdayaan Karang Taruna)								
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber	Terlaksananya kegiatan BPNT	85%	65,25%	85%	75%	88%	85%	160%	40%

	Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya peningkatan kualitas kelembagaan kesejahteraan sosial								
		Terlaksananya penyaluran bansos siswa miskin SMA/ SMK/ MA								
		Terwujudnya evaluasi pengentasan kemiskinan di Kab. Nganjuk								
1.06.04	**Program Rehabilitasi Sosial**	**Persentase Pelayanan PMKS**						**85%**	**85%**	**21%**
1.06.04.2.01	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Terwujudnya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**85%**	**65%**	**87%**	**81%**	**93%**	**85%**	**231%**	**58%**
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Terbentuknya dan terlaksananya fasilitasi kegiatan lansia	85%	39,14%	87%	75%	86%	85%	199%	50%
		Terlaksananya bantuan UEP bagi lansia								
		Terlaksananya KOMDA lansia miskin								
		Terlaksananya pelatihan ketrampilan kerja bagi lansia potensial								

		Terlaksananya penanganan ABH dan permasalahan anak lainnya di wilayah Kab. Nganjuk								
		Terlaksananya sosialisasi kawasan ramah lanjut usia								
		Terlaksananya sosialisasi perda kesejahteraan lanjut usia								
1.06.04.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Terlaksananya pemberian bantuan sosial untuk 3.500 lansia	85%	91%	87%	87%	100%	85%	263%	66%
		Terlaksananya verifikasi/ pendataan, distribusi, monev, dan laporan penyaluran bansos lansia miskin								
1.06.04.2.02	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial**	**Terwujudnya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial**	**85%**	**88%**	**87%**	**86%**	**99%**	**85%**	**259%**	**65%**
1.06.04.2.02.02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Terlaksananya penanganan PMKS , sosialisasi TRC, bimtek TRC, penanganan masalah strategi tentang cepat tanggap darurat dan kejadian luar biasa	85%	91%	87%	85%	98%	85%	261%	65%

		Hibah PMI								
1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Terlaksananya penanganan eks psikotik dan penderita gangguan jiwa	85%	74%	87%	87%	100%	85%	246%	62%
		Tersedianya pelayanan sosial dan penampungan sementara bagi PMKS terlantar								
1.06.04.2.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi keluarga PMKS	85%	99%	87%	87%	100%	85%	271%	68%
		Terlaksananya pemberian santunan kemiskinan bagi warga miskin								
1.06.05	**Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**	**Persentase Pelayanan PMKS**						**85%**	**85%**	**21%**
1.06.05.2.01	**Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar**	**Terwujudnya Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar**	**85%**	**0%**	**87%**	**87%**	**100%**	**85%**	**172%**	**43%**
1.06.05.2.01.03	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Terlaksananya pembinaan Pengelolaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)	85%	0%	87%	87%	100%	85%	172%	43%
		Terlaksananya BANSOS PANTI ASUHAN								
		Terlaksananya Bimtek pengasuhan anak sesuai dengan standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA)								

1.06.05.2.02	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Terwujudnya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**85%**	**86%**	**87%**	**85%**	**98%**	**85%**	**256%**	**64%**
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya evaluasi pengentasan kemiskinan	85%	86%	87%	85%	98%	85%	256%	64%
		Terlaksananya fasilitasi, verifikasi dan validasi BDT								
		Terlaksananya sosialisasi program/ kegiatan penanganan masalah sosial								
1.06.06	**Program Penanganan Bencana**	**Persentase Pelayanan PMKS**						**85%**	**85%**	**21%**
1.06.06.2.01	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**Terwujudnya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**85%**	**0**	**87%**	**87%**	**100%**	**85%**	**205%**	**51%**
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Teratasinya kebutuhan pangan bagi keluarga penerima manfaat akibat bencana alam maupun sosial	85%	33%	87%	87%	87%	85%	205%	51%
1.06.07	**Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan**	**Persentase PSKS yang aktif**						**85%**	**85%**	**21%**
1.06.07.2.01	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	**Terwujudnya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	**85%**	**22,25%**	**85%**	**85%**	**100%**	**85%**	**192%**	**48%**

1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terpeliharanya sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan	85%	22,25%	85%	85%	100%	85%	192%	48%
2	**Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**							**Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**		
2.08	**Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**							**Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**		
2.08.02	**Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**	**Terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender**						**100%**	**100%**	**25%**
2.08.02.2.01	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Terwujudnya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**90%**	**0%**	**93%**	**93%**	**100%**	**100%**	**193%**	**48%**
2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Terlaksananya pelaksanaan TOT bagi Tim Focal Point OPD	90%	0%	93%	93%	100%	100%	193%	48%
2.08.02.2.02	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Terwujudnya Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**90%**	**83%**	**93%**	**90%**	**97%**	**100%**	**273%**	**68%**

2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Terlaksananya pelatihan usaha ekonomi produktif perempuan	90%	83%	93%	90%	97%	100%	273%	68%
		Terlaksananya pembinaan dan pembekalan bagi calon pekerja migran Indonesia dan keluarga								
		Terlaksananya pembinaan organisasi perempuan dalam pembangunan								
		Terlaksananya pendayagunaan peran perempuan di bidang politik								
2.08.03	**Program Perlindungan Perempuan**	**Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak**						**100%**	**100%**	**25%**
2.08.03.2.02	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Terwujudnya Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**80%**	**47,5%**	**89%**	**89%**	**100%**	**100%**	**237%**	**59%**
2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya pemahaman dan kepedulian pengurus P2TP2A dalam penanganan kasus berdasarkan SOP	80%	47,5%	89%	89%	100%	100%	237%	59%
2.08.04	**Program Peningkatan Kualitas Keluarga**	**Terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender**						**100%**	**100%**	**25%**

2.08.04.2.01	**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Terwujudnya Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**90%**	**97%**	**93%**	**90%**	**97%**	**100%**	**287%**	**72%**
2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya sosialisasi dan pelatihan ketrampilan, pembinaan terpadu serta evaluasi di desa binaan	90%	97%	93%	90%	97%	100%	287%	72%
		Terlaksananya sosialiasasi peningkatan kemadirian industri kreatif								
2.08.04.2.03	**Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Terwujudnya Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**80%**	**93%**	**93%**	**93%**	**100%**	**100%**	**286%**	**72%**
2.08.04.2.03.01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya fasilitasi dan optimalisasi PUSPAGA dalam pengasuhan alternatif anak	80%	93%	93%	93%	100%	100%	286%	72%
2.08.06	**Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)**	**Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak**						**100%**	**100%**	**25%**

2.08.06.2.01	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Terwujudnya Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**80%**	**91%**	**89%**	**89%**	**100%**	**100%**	**280%**	**70%**
2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pertemuan pengurus FA dangugus tugas KLA dan Temu anak	80%	91%	89%	89%	100%	100%	280%	70%
2.08.06.2.02	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Terwujudnya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	**80%**	**98%**	**89%**	**0%**	**0%**	**100%**	**198%**	**50%**
2.08.06.2.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya sosialisasi program pengembangan KLA bagi masyarakat	80%	98%	89%	0%	0%	100%	198%	50%
2.08.07	**Program Perlindungan Khusus Anak**	**Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak**						**100%**	**100%**	**25%**
2.08.07.2.01	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Terwujudnya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**80%**	**0%**	**89%**	**89%**	**100%**	**100%**	**189%**	**47%**

2.08.07.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya pemahaman ASN dan lembaga peduli anak terhadap program kegiatan yang responsif pemenuhan hak anak	80%	0%	89%	89%	100%	100%	189%	47%

Nganjuk, 11 Juli 2022

Kepala Dinas Sosial PPPA

NAFIAN TOHAWI,SH.,MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19721208 199803 1 005

Berdasarkan tabel T-C.29 program/ kegiatan/ sub kegiatan sampai dengan tahun 2021 ada beberapa perbedaan. Program/ kegiatan yang ada pada Tahun 2021 tidak semuanya ada di Tahun 2020, hal ini dikarenakan nomenklatur yang berbeda pada Tahun 2020 dan 2021. Masih belum lengkapnya sarana dan prasarana serta SDM menyebabkan belum optimalnya pelayanan dan kinerja pada tahun 2021. Karena hal tersebut maka diperlukan kebijakan/ tindakan untuk mengatasi keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam penanganan PMKS maupun korban bencana, seperti masih adanya jabatan tiga (3) kasi yang kosong di bidang Perlindungan Jaminan dan Rehabilitasi Sosial serta kurangnya staf di masing-masing bidang. Selain itu masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tidak dilaporkan, untuk itu perlu edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya penanganan tindak kekerasan dalam lingkup keluarga dan lingkungan sekitar.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. Indikator Kinerja Utama

No	Indikator
1	Tingkat Kemiskinan
2	Persentase penurunan PMKS/PPKS
3	Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG)
4	Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indikator Kinerja Kunci

Indikator kinerja kunci Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada tabel berikut ini

Tabel 3. Indikator Kinerja Kunci

No	Indikator
1	Persentase jumlah PMKS/PPKS yang tertangani
2	Persentase PMKS/PPKS menurun
3	Persentase jumlah PSKS yang aktif
4	Persentase ASN perempuan yang menduduki jabatan struktural meningkat
5	Persentase kasus tindak kekerasan dan trafficking terhadap perempuan dan anak yang difasilitasi penyelesaiannya
6	Persentase Kecamatan Layak Anak

Data Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan dijabarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4. T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2021 (Tahun n-2)	Tahun 2022 (Tahun n-1)	Tahun 2023 (Tahun n)	Tahun 2021 (Tahun n-2)	Tahun 2022 (Tahun n-1)	Tahun 2023 (Tahun n)	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	13
1	Persentase jumlah PMKS/PPKS yang tertangani		95%	92%	94%	95%	97,80%	99%	94%	
2	Persentase jumlah PMKS/PPKS		3,57%	4,37%	3,97%	3,57%	4,76%	8%	7%	
3	Persentase jumlah PSKS yang aktif		65%	55%	60%	65%	68,37%	80%	82,50%	
4	Persentase ASN perempuan yang menduduki jabatan struktural meningkat		45%	35%	40%	45%	32,78%	35%	40%	

5	Persentase kasus tindak kekerasan dan trafficking terhadap perempuan dan anak yang difasilitasi penyelesaiannya		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Persentase Kecamatan Layak Anak		100%	50%	75%	100%	5%	10%	15%	

Nganjuk, 11 Juli 2021

Kepala Dinas Sosial PPPA

NAFHAN TOHAWI,SH.,MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19721208 199803 1 005

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

a. Permasalahan terkait kesejahteraan sosial:
   1) Belum optimalnya kualitas pelayanan sosial dikarenakan belum adanya database PPKS/PMKS yang Valid, Sarpras yang terbatas dan anggaran yang sangat minim.
   2) Masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Nganjuk yaitu sebesar 125.53 jiwa atau 11,85 %
   3) Jumlah PMKS/PPKS tahun 2021 di Kabupaten Nganjuk masih tinggi yaitu sebanyak 53.599 orang
   4) Masih kurangnya SDM unsur sosial yang berkualitas.
   5) Masih rendahnya usaha pemberdayaan masyarakat miskin.

2. Permasalahan terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak:
   1) Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada Tahun 2021 sebesar 93,76 relatif lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2021 sebesar 91,67
   2) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) pada Tahun 2021 sebesar 69,78 relatif lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2020 sebesar 73,03
   3) ASN Perempuan yang menduduki jabatan struktural masih rendah, yaitu sebesar 32,78%
   4) Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH)
   5) Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, terlihat dari kasus pornografi dan cyber crime
   6) Belum semua Puskesmas termasuk kategori Puskesmas Ramah Anak
   7) Belum semua sekolah termasuk kategori Sekolah Ramah Anak

8) Belum semua Kecamatan, Desa/ Kelurahan mengimplementasikan Pemenuhan Hak dan Perlindungan khusus Anak dalam Penyelenggaraan Kecamatan Layak Anak
9) Partisipasi Anak melalui kader Forum Anak di Kecamatan, Desa/ Kelurahan belum maksimal
10) Peran Lembaga Layanan Pengasuh Anak melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) belum terjangkau sampai ke Tingkat Kecamatan
11) Jumlah Perkawinan Anak Meningkat
12) Sumber Daya Manusia yang mengikuti Pelatihan Bimtek KHA di Lembaga Layanan Peniddik, Kesehatan dan Rehabilitasi Sosial masih rendah
13) Kasus Kekerasan Terhadap Anak cenderung meningkat
14) Peran P2TP2A kurang optimal dan belum ada UPTD. PPPA
15) Belum sinerginya lembaga layanann anak
16) Belum adanya regulasi Perda Penyelenggaraan bagi penyandang disabilitas anak
17) Minimnya keterlibatan lembaga masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam merespon anak yang memerlukan perlindungan khusus
18) Anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus belum secara maksimal di penuhi hak-haknya
19) Kerentanan keluarga sebagai dampak covid-19
20) Ketimpangan relasi gender menyebabkan diskriminasi hubungan keluarga
21) Keterbatasan sumberdaya pemerintah dalam pembangunan keluarga maka, perlu partisipasi masyarakat dan stakeholder untuk pembangunan/ kualitas keluarga
22) Tingkat perceraian perceraian, perkawinan usia anak, kmeiskinan, KDRT, Narkoba dan masalah sosial perlu penyedia layanan Konseling
23) Belum tersedianya data pilah gender sebagai dasar perencanaan pembangunan responsif gender dan penyediaan data gender dan anak

Visi Pembangunan Kabupaten NganjukTahun 2018 – 2023 dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2018 – 2023 dalam RPJMD adalah :**“Terwujudnya Kabupaten Nganjuk yang Maju dan Bermartabat (Nganjuk Nyawiji Mbangun Deso Noto Kutho)”** Unsur visi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah berkomitmen untuk maju dengan membangun desa dan menata kotayang berarti untuk mewujudkan masyarakat Nganjuk yang maju merata antara desa dan kota harus diikuti dengan penumbuhan kreatifitas masyarakat, dalam pengertian ada keseimbangan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Dalam rangka pencapaian visi diatas, misi pembangunan jangka menengah dalam RPJMD yang sesuai dengan pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Misi ke 3 yaitu:

“Meningkatkan kualitas, pelayanan dan mutu pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan SDM yang berkualitas”

Tujuan : Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas SDM yang unggul.

Sasaran :

1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat
2. Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Misi tersebut ditujukan untuk terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik yang prima untuk mencapai kesejahteraan kehidupan masyarakat. Berdasarkan Misi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk sebagai salah satu lembaga teknis daerah dan sebagai salah satu OPD pelaksana urusan OTODA merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang dapat memberikan pelayanan sosial secara tepat, efesien, efektif sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang berciri transparansi, partisipatif dan akuntabilitas.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 2.3 berikut ini.

Tabel 5. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat dalam Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi: 1.Meningkatkan kualitas, pelayanan dan mutu pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan SDM yang berkualitas	Belum efektifnya pemberdayaan masyarakat miskin Penanganan kasus PMKS/PPKS belum maksimal Masih banyaknya data orang miskin dan tidak memiliki rumah layak huni IDG relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT. Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan. Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan	• Belum ada data akurat dan berkelanjutan tentang angka kemiskinan • Kurangnya sarana dan fasilitas untuk penanganan PMKS/PPKS terlantar • Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. • Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender • Terbatasnya	• Adanya komitmen pemerintah untuk mengentaskan dan mengurangi angka kemiskinan melalu program-program pemerintah pro rakyat miskin • Adanya kepedulian masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan pro kemiskinan • Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan dan nilai modal sosial Perempuan • Adanya kerjasama yang baik antara
2	Tujuan: 1. Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas SDM yang unggul			
3	Sasaran: 1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat 2. Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak			

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		dengan hukum (ABH). Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak	personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A/PPA • Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak

2.4. Review terhadap Rancangan RKPD

Rancangan RKPD tahun 2023 tidak jauh berbeda dengan RKPD 2022, tapi akan terdapat beberapa kegiatan yang dirasa penting untuk dilaksanakan yang belum bisa direalisasikan di tahun sebelumnya. Dalam pelaksanaan RKPD dari tahun 2018-2019 masih banyak kegiatan yang belum bisa dilaksanakan secara optimal karena terkait terbatasnya anggaran. Dalam kegiatan di Dinas Sosial PPPA terdapat beberapa kegiatan yang merupakan kegiatan PKK sehingga membutuhkan anggaran yang cukup mengingat kegiatan PKK merupakan salah satu penunjang dalam pencapaian tujuan dan tercapainya indikator perangkat daerah dalam memberdayakan perempuan dan masyarakat. Berikut ini rencana kegiatan baru yang akan dimasukkan dalam RKPD 2023 :

* **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
* **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
  1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
  1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
  3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
- **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
  1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- **Administrasi Umum Perangkat Daerah**
  1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
  4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  5. Fasilitasi Kunjungan Tamu
  6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
  1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
  1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
  1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  2. Pemeliharaan Mebel
  3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

B. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

- **Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota**
  1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
- **Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**
  1. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
  2. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
  3. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

C. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

- **Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**
  1. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
  2. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
  3. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
  4. Pemberian Layanan Kedaruratan

- **Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**
    1. Penyediaan Permakanan
    2. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
    3. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
    4. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/ Kota

D. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

- **Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**
    1. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
    2. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

E. PROGRAM PENANGANAN BENCANA

- **Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**
    1. Penyediaan Makanan

F. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

- **Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota**
    1. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota

* **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**

* **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

A. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

- **Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota**
    1. Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG

2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/ Kota
3. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
4. Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG

- **Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota**
  1. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
  2. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
- **Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota**
  1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota
  2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota
  3. Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota

B. PERLINDUNGAN PEREMPUAN

- **Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/ Kota**
  1. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/ Kota
- **Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**
  1. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota

C. PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

- **Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**
  1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota
  2. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota
  3. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota
- **Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**
  1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
  2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
  3. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
- **Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**
  1. Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota

D. PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

- **Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**
  1. Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/ Kota
  2. Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/ Kota

E. PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

- **Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota**
  1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota
  2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota
- Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota
  1. Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota

F. PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

- **Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota**
  1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota
- **Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**
  1. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/ Kota
3. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/ Kota

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil penelahaan pada Tahun 2023 Dinas Sosial tidak mendapat usulan program/ kegiatan yang diusulkan pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, organisasi masyarakat, asosiasi dan/atau organisasi profesi yang terkait langsung dengan pelayanan Perangkat Daerah, Pokok-Pokok Pikiran DPRD, dan Hasil musrembang Kecamatan.

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
NIHIL					

Penjelasan untuk rancangan RKPD tahun 2023 akan dijelaskan dalam Tabel T-C.31 sebagai berikut :

Tabel 6. T-C.31 Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2023 Kabupaten Nganjuk

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	3	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				**16.263.521.320**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**				**16.263.521.320**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Terpenuhinya Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota**	**100%**	**4.627.375.720**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Terpenuhinya Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota**	**100%**	**4.627.375.720**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Terpenuhinya Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota**	**100%**	**22.887.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Terpenuhinya Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota**	**100%**	**22.887.000**	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	2 Laporan	12.150.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	2 Laporan	12.150.000	

			Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	10.737.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	10.737.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Terpenuhinya Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota**	**100%**	**3.661.833.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Terpenuhinya Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota**	**100%**	**3.661.833.000**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	3.486.885.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	3.486.885.000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	167.688.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	167.688.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.630.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.630.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuang	17 Laporan	3.630.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuang	17 Laporan	3.630.000	

			Bulanan/Triwulanan/Semeste SKPD					Bulanan/Triwulanan/Semeste SKPD			
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Terpenuhinya Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota**	**100%**	**11.000.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Terpenuhinya Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota**	**100%**	**11.000.000**	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	11.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	11.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Terpenuhinya Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota**	**100%**	**226.634.470**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Terpenuhinya Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota**	**100%**	**226.634.470**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Paket	7.971.460	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Paket	7.971.460	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	124.806.600	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	124.806.600	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah barang paket cetakan dan penggadaan yang disediakan	2 paket	35.438.910	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah barang paket cetakan dan penggadaan yang disediakan	2 paket	35.438.910	

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.800.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.800.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 Laporan	33.314.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 Laporan	33.314.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	23.303.500	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	23.303.500	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Terpenuhinya Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota**	**100%**	**32.200.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Terpenuhinya Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota**	**100%**	**32.200.000**	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	6 unit	32.200.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	6 unit	32.200.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Terpenuhinya Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota**	**100%**	**221.000.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Terpenuhinya Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota**	**100%**	**221.000.000**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan penyediaan surat menyurat	2 Laporan	2.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan penyediaan surat menyurat	2 Laporan	2.000.000	

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik yang disediakan	3 laporan	144.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik yang disediakan	3 laporan	144.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan oenyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	75.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan oenyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	75.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Terpenuhinya Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota**	**100%**	**451.821.250**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Terpenuhinya Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota**	**100%**	**451.821.250**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 unit	260.125.500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 unit	260.125.500	
	Pemeliharaan Mebel	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	1.004.400	Pemeliharaan Mebel	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	1.004.400	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	51 Unit	27.250.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	51 Unit	27.250.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	5 unit	163.441.350	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	5 unit	163.441.350	

	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	**Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase PSKS yang Aktif**	**85%**	**327.640.750**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase PSKS yang Aktif**	**85%**	**327.640.750**	
	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase PSKS yang Aktif**	**85%**	**18.061.800**	**Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase PSKS yang Aktif**	**85%**	**18.061.800**	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	4 dokumen	18.061.800	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	4 dokumen	18.061.800	
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	**Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase PSKS yang Aktif**	**85%**	**309.578.950**	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase PSKS yang Aktif**	**85%**	**309.578.950**	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	75 orang	17.778.350	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	75 orang	17.778.350	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	20 orang	276.382.200	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	20 orang	276.382.200	

	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	50 lembaga	15.418.400	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	50 lembaga	15.418.400	
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	**Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Terpenuhinya Rehabilitasi Sosial**	**87%**	**9.998.700.500**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Terpenuhinya Rehabilitasi Sosial**	**87%**	**9.998.700.500**	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	**Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Terpenuhinya Rehabilitasi Sosial**	**87%**	**8.826.300.300**	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Terpenuhinya Rehabilitasi Sosial**	**87%**	**8.826.300.300**	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/.Kota	75 Orang	42.856.800	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/.Kota	75 Orang	42.856.800	
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usioa Terlantar, serta Gelandangan Penegemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	420 Orang	766.000.000	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usioa Terlantar, serta Gelandangan Penegemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	420 Orang	766.000.000	

	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/ Kota	4068 Orang	7.384.295.750	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/ Kota	4068 Orang	7.384.295.750	
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	633.147.750	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	633.147.750	
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	**Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Terpenuhinya Rehabilitasi Sosial**	**87%**	**1.172.400.200**	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Terpenuhinya Rehabilitasi Sosial**	**87%**	**1.172.400.200**	
	Penyediaan Permakanan	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	1000 Orang	174.745.250	Penyediaan Permakanan	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	1000 Orang	174.745.250	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/.Kota	155 Orang	201.394.950	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/.Kota	155 Orang	201.394.950	
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang mendapatkan Pelayanan Reunifikasi	50 Orang	10.000.000	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang mendapatkan Pelayanan Reunifikasi	50 Orang	10.000.000	

			Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota					Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	21 Lembaga	786.260.000	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	21 Lembaga	786.260.000	
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	**Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Terpenuhinya Perlindungan dan Jaminan Sosial**	**87%**	**1.020.491.400**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Terpenuhinya Perlindungan dan Jaminan Sosial**	**87%**	**1.020.491.400**	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Terpenuhinya Perlindungan dan Jaminan Sosial**	**87%**	**1.020.491.400**	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Terpenuhinya Perlindungan dan Jaminan Sosial**	**87%**	**1.020.491.400**	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	284 Keluarga	135.991.400	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	284 Keluarga	135.991.400	
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1166 Keluarg	884.500.000	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1166 Keluarg	884.500.000	
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	**Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua**	**Persentase Pelayanan PMKS**	**87%**	**234.788.050**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua**	**Persentase Pelayanan PMKS**	**87%**	**234.788.050**	

		Kelurahan					**Kelurahan**				
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	**Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase Pelayanan PMKS**	**87%**	**234.788.050**	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase Pelayanan PMKS**	**87%**	**234.788.050**	
	Penyediaan Makanan	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	55 Orang	234.788.050	Penyediaan Makanan	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	55 Orang	234.788.050	
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	**Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase Fasilitasi TMP**	**85%**	**54.524.900**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase Fasilitasi TMP**	**85%**	**54.524.900**	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	**Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase Fasilitasi TMP**	**85%**	**54.524.900**	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	**Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase Fasilitasi TMP**	**85%**	**54.524.900**	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam	54.524.900	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam	54.524.900	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					

	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				**820.761.650**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**				**820.761.650**	
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	**Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Terwujudnya Keadilan dan Kesetaraan Gender**	**100%**	**150.000.000**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Terwujudnya Keadilan dan Kesetaraan Gender**	**100%**	**150.000.000**	
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	**Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Terwujudnya Keadilan dan Kesetaraan Gender**	**100%**	**74.850.000**	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Terwujudnya Keadilan dan Kesetaraan Gender**	**100%**	**74.850.000**	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/ Kota	4 Dokumen	7.200.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/ Kota	4 Dokumen	7.200.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	25.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	25.000.000	

	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	52 Perangkat Daerah	34.650.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	52 Perangkat Daerah	34.650.000	
	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	52 Perangkat Daerah	8.000.000	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	52 Perangkat Daerah	8.000.000	
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	**Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Terwujudnya Keadilan dan Kesetaraan Gender**	**100%**	**16.850.000**	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Terwujudnya Keadilan dan Kesetaraan Gender**	**100%**	**16.850.000**	

	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	8.200.000	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	8.200.000	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/ Kota	50 Organisasi	8.650.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/ Kota	50 Organisasi	8.650.000	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	**Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Terwujudnya Keadilan dan Kesetaraan Gender**	**100%**	**58.300.000**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Terwujudnya Keadilan dan Kesetaraan Gender**	**100%**	**58.300.000**	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	50 Lembaga	9.500.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	50 Lembaga	9.500.000	

	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	1912 Orang	40.800.000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	1912 Orang	40.800.000	
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	50 Dokumen	8.000.000	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	50 Dokumen	8.000.000	
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	**Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan**	**100%**	**218.723.600**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan**	**100%**	**218.723.600**	
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	**Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan**	**100%**	**199.999.500**	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan**	**100%**	**199.999.500**	
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	70 orang	199.999.500	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	70 orang	199.999.500	

	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan**	**100%**	**18.724.100**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan**	**100%**	**18.724.100**	
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 dokumen	18.724.100	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 dokumen	18.724.100	
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	**Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak Tingkat Daerah/ Kota Terwujudnya Peningkatan Kualitas Keluarga**	**100%**	**142.267.550**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak Tingkat Daerah/ Kota Terwujudnya Peningkatan Kualitas Keluarga**	**100%**	**142.267.550**	
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak Tingkat Daerah/ Kota Terwujudnya Peningkatan Kualitas**	**100%**	**71.754.850**	**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak Tingkat Daerah/ Kota Terwujudnya Peningkatan Kualitas**	**100%**	**71.754.850**	

			Keluarga					**Keluarga**			
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	52 Perangkat Daerah	15.000.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	52 Perangkat Daerah	15.000.000	
	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	41.754.850	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	41.754.850	
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	15.000.000	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	15.000.000	

	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak Tingkat Daerah/ Kota Terwujudnya Peningkatan Kualitas Keluarga**	**100%**	**39.999.700**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak Tingkat Daerah/ Kota Terwujudnya Peningkatan Kualitas Keluarga**	**100%**	**39.999.700**	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	20 Lembaga	14.999.800	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	20 Lembaga	14.999.800	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	14.999.900	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	14.999.900	

	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	10.000.000	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	10.000.000	
	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak Tingkat Daerah/ Kota Terwujudnya Peningkatan Kualitas Keluarga**	**100%**	**30.513.000**	**Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak Tingkat Daerah/ Kota Terwujudnya Peningkatan Kualitas Keluarga**	**100%**	**30.513.000**	
	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	30 Layanan	30.513.000	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	30 Layanan	30.513.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	**Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase OPD yang Memanfaatkan Data Gender dan Anak**	**100%**	**17.530.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase OPD yang Memanfaatkan Data Gender dan Anak**	**100%**	**17.530.000**	

	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase OPD yang Memanfaatkan Data Gender dan Anak**	**100%**	**17.530.000**	**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase OPD yang Memanfaatkan Data Gender dan Anak**	**100%**	**17.530.000**	
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	52 Dokumen	10.000.000	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	52 Dokumen	10.000.000	
	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	7.530.000	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	7.530.000	
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	**Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Meningkatnya Kualitas Hidup Anak**	**100%**	**189.309.500**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Meningkatnya Kualitas Hidup Anak**	**100%**	**189.309.500**	
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	**Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Meningkatnya Kualitas Hidup Anak**	**100%**	**85.446.500**	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Meningkatnya Kualitas Hidup Anak**	**100%**	**85.446.500**	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan	14 organisasi	10.000.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan	14 organisasi	10.000.000	

			Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha					Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4 organisasi	75.446.500	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4 organisasi	75.446.500	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	**Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Meningkatnya Kualitas Hidup Anak**	**100%**	**103.863.000**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Meningkatnya Kualitas Hidup Anak**	**100%**	**103.863.000**	
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	103.863.000	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	103.863.000	
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	**Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Meningkatnya Kualitas Hidup Anak**	**100%**	**102.931.000**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Meningkatnya Kualitas Hidup Anak**	**100%**	**102.931.000**	
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Meningkatnya Kualitas Hidup Anak**	**100%**	**9.810.700**	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Meningkatnya Kualitas Hidup Anak**	**100%**	**9.810.700**	

	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Perangkat Daerah	9.810.700	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Perangkat Daerah	9.810.700	
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Meningkatnya Kualitas Hidup Anak**	**100%**	**93.120.300**	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Meningkatnya Kualitas Hidup Anak**	**100%**	**93.120.300**	
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	58.968.000	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	58.968.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan	150 layanan	15.921.100	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan	150 layanan	15.921.100	

			Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota					Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota			
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	3 dokumen	18.231.200	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	3 dokumen	18.231.200	
Jumlah Total					**17.084.282.970**	**Jumlah Total**					**17.084.282.970**

Nganjuk, 11 Juli 2022

Kepala Dinas Sosial PPPA

NATHAN TOHAWI,SH.,MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19721208 199803 1 005

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1.Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sejalan dengan arah kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2019-2024 dan dalam rangka untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan tahun 2018, maka arah kebijakan pembangunan bidang-bidang di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak difokuskan mendukung pencapaian **Misi ke 4 "Mewujudkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia yang Tinggi, Maju, dan Sejahtera"**.

Kebijakan Umum Proritas Urusan Wajib Sosial di tetapkan :

a. Program Pemberdayaan Sosial
b. Program Rehabilitasi Sosial
c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
d. Program Penanganan Bencana
e. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Kebijakan Umum Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diprioritaskan pada :

a. Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
b. Perlindungan Perempuan
c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
d. Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
e. Pemenuhan Hak Anak (PHA)
f. Perlindungan Khusus Anak

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Dalam Rangka mewujudkan misi ke 3 Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk **"Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Mutu Pendidikan dan Kesehatan untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas"**, maka perlu dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional yang dituangkan dalam Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk ahun 2023, yaitu:

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh perangkat daerah diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat

   Indikator 1 : Tingkat Kemiskinan

   Indikator 2 : Persentase Penurunan PMKS/ PPKS

   Sasaran yang dicapai dari tujuan ini meliputi sebagai berikut :

   a. Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial

      Indikator : - Persentase jumlah PMKS/PPKS yang tertangani
      - Persentase jumlah PMKS/PPKS menurun

   b. Meningkatnya jumlah PSKS yang aktif

      Indikator : Persentase jumlah PSKS yang aktif

2. Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

   Indikator 1 : Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG)

   Indikator 2 : Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

   Sasaran yang dicapai dari tujuan ini adalah :

   a. Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender

   b. Meningkatnya pemberdayaan perempuan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak

      Indikator : - Meningkatnya persentase ASN perempuan yang menduduki jabatan struktural.
      - Persentase kasus tindak kekerasan dan trafficking terhadap perempuan dan anak yang difasilitasi penyelesaiannya.
      - Persentase Kecamatan yang Layak Anak

3.3 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada SIPD

Tabel 7. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**06**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**								**16.263.521.320**					**16.486.945.750**
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**4.627.375.720**					**4.731.170.000**
1	**06**	**01**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**22.887.000**					**25.873.000**
1	06	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terpenuhinya Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Laporan	100 %	12.150.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terpenuhinya Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100 %	6.655.000
1	06	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Laporan	100 %	10.737.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terpenuhinya Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100 %	8.218.000
1	**06**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**3.661.833.000**					**3.764.883.000**

1	06	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	3.486.885.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terpenuhinya Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100 %	3.586.885.000
1	06	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terpenuhinya Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terpenuhinya Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	167.688.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terpenuhinya Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100 %	168.638.000
1	06	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terpenuhinya Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terpenuhinya Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	3.630.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terpenuhinya Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100 %	4.680.000
1	06	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Terpenuhinya Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuang Bulanan/Triwulanan/Semeste SKPD	Terpenuhinya Penunjang Urusan pemerintah Daerah aKnabupaten/ Kota ran	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	17 Laporan	100 %	3.630.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terpenuhinya Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100 %	4.680.000
1	**06**	**01**	**2,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**11.000.000**					**8.800.000**
1	06	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terpenuhinya Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Terpenuhinya Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	40 Orang	100 %	11.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terpenuhinya Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100 %	8.800.000
1	**06**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**226.634.470**					**196.832.200**

1	06	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Terpenuhinya Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Paket	100 %	7.971.460	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terpenuhinya Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100 %	10.750.700
1	06	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Paket	100 %	124.806.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terpenuhinya Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100 %	93.375.950
1	06	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah barang paket cetakan dan penggadaan yang disediakan	Terpenuhinya Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 paket	100 %	35.438.910	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terpenuhinya Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100 %	40.334.550
1	06	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Terpenuhinya Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	1.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terpenuhinya Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100 %	2.800.000
1	06	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Terpenuhinya Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	33.314.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terpenuhinya Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100 %	29.722.250
1	06	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terpenuhinya Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	23.303.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terpenuhinya Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100 %	19.848.750
1	**06**	**01**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**32.200.000**					**34.500.000**

1	06	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Terpenuhinya Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 unit	100 %	32.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terpenuhinya Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100 %	34.500.000
1	**06**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**221.000.000**					**224.000.000**
1	06	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan penyediaan surat menyurat	Terpenuhinya Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Laporan	100 %	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terpenuhinya Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100 %	3.000.000
1	06	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik yang disediakan	Terpenuhinya Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 laporan	100 %	144.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terpenuhinya Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100 %	145.000.000
1	06	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan oenyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Terpenuhinya Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 laporan	100 %	75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terpenuhinya Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100 %	76.000.000
1	**06**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**451.821.250**					**476.281.800**
1	06	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terpenuhinya Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	27 unit	100 %	260.125.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terpenuhinya Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100 %	251.298.100

1	06	01	2,09	05	Pemeliharaan Mebel	Terpenuhinya Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Terpenuhinya Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Unit	100 %	1.004.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terpenuhinya Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100 %	2.000.000
1	06	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Terpenuhinya Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	51 Unit	100 %	27.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terpenuhinya Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100 %	34.790.000
1	06	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Terpenuhinya Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 unit	100 %	163.441.350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terpenuhinya Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100 %	188.193.700
1	**06**	**02**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**								**327.640.750**					**334.599.800**
1	**06**	**02**	**2,02**		**Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**18.061.800**					**25.335.500**
1	06	02	2,02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Persentase PSKS yang Aktif	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Persentase PSKS yang Aktif	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	4 dokumen	85 %	18.061.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase PSKS yang Aktif	85 %	25.335.500
1	**06**	**02**	**2,03**		**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**								**309.578.950**					**309.264.300**
1	06	02	2,03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang Aktif	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang Aktif	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	75 orang	85 %	17.778.350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase PSKS yang Aktif	85 %	21.800.000

1	06	02	2,03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang Aktif	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang Aktif	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	20 orang	85 %	276.382.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase PSKS yang Aktif	85 %	265.078.300
1	06	02	2,03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang Aktif	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang Aktif	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	50 lembaga	85 %	15.418.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase PSKS yang Aktif	85 %	22.386.000
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**								**9.998.700.500**					**10.099.887.950**
1	**06**	**04**	**2,01**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**								**8.826.300.300**					**8.948.500.600**
1	06	04	2,01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Terpenuhinya Rehabilitasi Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/.Kota	Terpenuhinya Rehabilitasi Sosial	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	75 Orang	87 %	42.856.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terpenuhinya Rehabilitasi Sosial	87 %	63.056.800
1	06	04	2,01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Terpenuhinya Rehabilitasi Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usioa Terlantar, serta Gelandangan Penegemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Rehabilitasi Sosial	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	420 Orang	87 %	766.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terpenuhinya Rehabilitasi Sosial	87 %	767.000.000

1	06	04	2,01	09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Terpenuhinya Rehabilitasi Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Terpenuhinya Rehabilitasi Sosial	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	4068 Orang	87 %	7.384.295.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terpenuhinya Rehabilitasi Sosial	87 %	7.484.296.050
1	06	04	2,01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Terpenuhinya Rehabilitasi Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Rehabilitasi Sosial	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	100 Orang	87 %	633.147.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terpenuhinya Rehabilitasi Sosial	87 %	634.147.750
1	**06**	**04**	**2,02**		**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**								**1.172.400.200**					**1.151.387.350**
1	06	04	2,02	03	Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Rehabilitasi Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Rehabilitasi Sosial	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	1000 Orang	87 %	174.745.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terpenuhinya Rehabilitasi Sosial	87 %	150.732.400
1	06	04	2,02	07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Terpenuhinya Rehabilitasi Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/.Kota	Terpenuhinya Rehabilitasi Sosial	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	155 Orang	87 %	201.394.950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terpenuhinya Rehabilitasi Sosial	87 %	202.394.950
1	06	04	2,02	12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Terpenuhinya Rehabilitasi Sosial	Jumlah Orang yang mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Rehabilitasi Sosial	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	50 Orang	87 %	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terpenuhinya Rehabilitasi Sosial	87 %	11.000.000

1	06	04	2,02	14	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Rehabilitasi Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Rehabilitasi Sosial	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	21 Lembaga	87 %	786.260.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terpenuhinya Rehabilitasi Sosial	87 %	787.260.000
1	**06**	**05**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**								**1.020.491.400**					**1.033.499.850**
1	**06**	**05**	**2,02**		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**								**1.020.491.400**					**1.033.499.850**
1	06	05	2,02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	284 Keluarga	87 %	135.991.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terpenuhinya Perlindungan dan Jaminan Sosial	87 %	136.999.850
1	06	05	2,02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terpenuhinya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	1166 Keluarg	a 87 %	884.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terpenuhinya Perlindungan dan Jaminan Sosial	87 %	885.500.000
1	**06**	**06**			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**								**234.788.050**					**235.788.150**
1	**06**	**06**	**2,01**		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**								**234.788.050**					**235.788.150**
1	06	06	2,01	01	Penyediaan Makanan	Persentase Pelayanan PMKS	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan PMKS	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	55 Orang	87 %	234.788.050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelayanan PMKS	87 %	235.788.150
1	**06**	**07**			**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**								**54.524.900**					**52.000.000**
1	**06**	**07**	**2,01**		**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**								**54.524.900**					**52.000.000**

1	06	07	2,01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitasi TMP	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitasi TMP	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	1 Makam	85 %	54.524.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Fasilitasi TMP	85 %	52.000.000
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**08**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**								**820.761.650**					**618.722.900**	
2	**08**	**02**			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**								**150.000.000**					**123.384.650**	
2	**08**	**02**	**2,01**		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**								**74.850.000**					**43.234.650**	
2	08	02	2,01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Terwujudnya Keadilan dan Kesetaraan Gender	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/ Kota	Terwujudnya Keadilan dan Kesetaraan Gender	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Dokumen	100 %	7.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya Keadilan dan Kesetaraan Gender	100 %	8.200.000
2	08	02	2,01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Terwujudnya Keadilan dan Kesetaraan Gender	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Terwujudnya Keadilan dan Kesetaraan Gender	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya Keadilan dan Kesetaraan Gender	100 %	26.000.000

2	08	02	2,01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Terwujudnya Keadilan dan Kesetaraan Gender	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Terwujudnya Keadilan dan Kesetaraan Gender	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	52 Perangkat Daerah	100 %	34.650.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya Keadilan dan Kesetaraan Gender	100 %	34.650
2	08	02	2,01	04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Terwujudnya Keadilan dan Kesetaraan Gender	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Terwujudnya Keadilan dan Kesetaraan Gender	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	52 Perangkat Daerah	100 %	8.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya Keadilan dan Kesetaraan Gender	100 %	9.000.000
2	**08**	**02**	**2,02**		**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**								**16.850.000**					**18.850.000**
2	08	02	2,02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Terwujudnya Keadilan dan Kesetaraan Gender	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Terwujudnya Keadilan dan Kesetaraan Gender	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	8.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya Keadilan dan Kesetaraan Gender	100 %	9.200.000

2	08	02	2,02	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Terwujudnya Keadilan dan Kesetaraan Gender	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Terwujudnya Keadilan dan Kesetaraan Gender	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	50 Organisasi	100 %	8.650.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya Keadilan dan Kesetaraan Gender	100 %	9.650.000
2	**08**	**02**	**2,03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**								**58.300.000**					**61.300.000**
2	08	02	2,03	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terwujudnya Keadilan dan Kesetaraan Gender	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Terwujudnya Keadilan dan Kesetaraan Gender	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	50 Lembaga	100 %	9.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya Keadilan dan Kesetaraan Gender	100 %	10.500.000
2	08	02	2,03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terwujudnya Keadilan dan Kesetaraan Gender	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Terwujudnya Keadilan dan Kesetaraan Gender	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1912 Orang	100 %	40.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya Keadilan dan Kesetaraan Gender	100 %	41.800.000
2	08	02	2,03	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terwujudnya Keadilan dan Kesetaraan Gender	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Terwujudnya Keadilan dan Kesetaraan Gender	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	50 Dokumen	100 %	8.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya Keadilan dan Kesetaraan Gender	100 %	9.000.000

2	**08**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**								**218.723.600**						**26.724.100**
2	**08**	**03**	**2,02**		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**								**199.999.500**						**9.000.000**
2	08	03	2,02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	70 orang	100 %	199.999.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan	100 %	3.000.000
2	**08**	**03**	**2,03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**18.724.100**						**12.724.100**
2	08	03	2,03	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 dokumen	100 %	18.724.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan	100 %	3.324.100
2	**08**	**04**			**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**								**142.267.550**						**148.267.550**
2	**08**	**04**	**2,01**		**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**71.754.850**						**74.754.850**
2	08	04	2,01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak Tingkat Daerah/ Kota Terwujudnya Peningkatan Kualitas Keluarga	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak Tingkat Daerah/ Kota, Terwujudnya Peningkatan Kualitas Keluarga	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	52 Perangkat Daerah	100 %	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak Tingkat Daerah/ Kota Terwujudnya Peningkatan Kualitas Keluarga	100 % 100 %	16.000.000

2	08	04	2,01	02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak Tingkat Daerah/ Kota Terwujudnya Peningkatan Kualitas Keluarga	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak Tingkat Daerah/ Kota, Terwujudnya Peningkatan Kualitas Keluarga	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	1 Dokumen	100 %	41.754.850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak Tingkat Daerah/ Kota Terwujudnya Peningkatan Kualitas Keluarga	100 % 100 %	42.754.850
2	08	04	2,01	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak Tingkat Daerah/ Kota Terwujudnya Peningkatan Kualitas Keluarga	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak Tingkat Daerah/ Kota, Terwujudnya Peningkatan Kualitas Keluarga	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	1 Laporan	100 %	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak Tingkat Daerah/ Kota Terwujudnya Peningkatan Kualitas Keluarga	100 % 100 %	16.000.000
2	**08**	**04**	**2,02**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**39.999.700**					**41.999.700**
2	08	04	2,02	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak Tingkat Daerah/ Kota Terwujudnya Peningkatan Kualitas Keluarga	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak Tingkat Daerah/ Kota, Terwujudnya Peningkatan Kualitas Keluarga	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	20 Lembaga	100 %	14.999.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak Tingkat Daerah/ Kota Terwujudnya Peningkatan Kualitas Keluarga	100 % 100 %	15.999.800

2	08	04	2,02	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak Tingkat Daerah/ Kota Terwujudnya Peningkatan Kualitas Keluarga	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak Tingkat Daerah/ Kota, Terwujudnya Peningkatan Kualitas Keluarga	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	50 Orang	100 %	14.999.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak Tingkat Daerah/ Kota Terwujudnya Peningkatan Kualitas Keluarga	100 % 100 %	15.999.900
2	08	04	2,02	03	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak Tingkat Daerah/ Kota Terwujudnya Peningkatan Kualitas Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak Tingkat Daerah/ Kota, Terwujudnya Peningkatan Kualitas Keluarga	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	1 Dokumen	100 %	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak Tingkat Daerah/ Kota Terwujudnya Peningkatan Kualitas Keluarga	100 % 100 %	10.000.000
2	**08**	**04**	**2,03**		**Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**30.513.000**					**31.513.000**
2	08	04	2,03	01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Terwujudnya Peningkatan Kualitas	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota, Terwujudnya Peningkatan Kualitas	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	30 Layanan	100 %	30.513.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Terwujudnya Peningkatan Kualitas Keluarga	100 % 100 %	31.513.000

						Keluarga		Keluarga										
2	**08**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**								**17.530.000**					**19.530.000**
2	**08**	**05**	**2,01**		**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**17.530.000**					**19.530.000**
2	08	05	2,01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang Memanfaatkan Data Gender dan Anak	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Persentase OPD yang Memanfaatkan Data Gender dan Anak	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	52 Dokumen	100 %	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase OPD yang Memanfaatkan Data Gender dan Anak	100 %	11.000.000
2	08	05	2,01	02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang Memanfaatkan Data Gender dan Anak	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang Memanfaatkan Data Gender dan Anak	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	7.530.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase OPD yang Memanfaatkan Data Gender dan Anak	100 %	8.530.000
2	**08**	**06**			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**								**189.309.500**					**193.885.600**
2	**08**	**06**	**2,01**		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**								**85.446.500**					**89.000.000**
2	08	06	2,01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Hidup Anak	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Meningkatnya Kualitas Hidup Anak	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	14 organisasi	100 %	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Hidup Anak	100 %	11.000.000

2	08	06	2,01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Hidup Anak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Hidup Anak	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 organisasi	100 %	75.446.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Hidup Anak	100 %	78.000.000
2	**08**	**06**	**2,02**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**								**103.863.000**					**104.885.600**
2	08	06	2,02	01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Hidup Anak	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Hidup Anak	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 orang	100 %	103.863.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Hidup Anak	100 %	104.885.600
2	**08**	**07**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**								**102.931.000**					**106.931.000**
2	**08**	**07**	**2,01**		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**								**9.810.700**					**11.750.000**
2	08	07	2,01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Hidup Anak	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Hidup Anak	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	30 Perangkat Daerah	100 %	9.810.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Hidup Anak	100 %	11.750.000
2	**08**	**07**	**2,02**		**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**93.120.300**					**95.181.000**

2	08	07	2,02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Hidup Anak	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas HIdup Anak	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	50 orang	100 %	58.968.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Hidup Anak	100 %	49.750.000
2	08	07	2,02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Hidup Anak	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas HIdup Anak	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	150 layanan	100 %	15.921.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Hidup Anak	100 %	20.830.000
2	08	07	2,02	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Hidup Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas HIdup Anak	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 dokumen	100 %	18.231.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Hidup Anak	100 %	24.601.000
												TOTAL	**17.084.282.970**				**17.105.668.650**

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Prioritas Daerah	Alokasi (2023)
1	Fasilitasi bantuan sosial Kesejahteraan Keluarga	884.500.000
2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	7.200.000
4	Koordinasi dan singkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan Kab/Kota	25.000.000
5	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	34.650.000
6	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	8.000.000
7	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	7.384.295.750
8	Pengelolaan Fakir miskin cakupan daerah Kab/kota	135.991.400
9	Peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat kewenganan Kab/Kota	17.778.350
10	Peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kab/kota	276.382.200

4.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Nganjuk Tahun 2023, prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu:

1. *Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran*
2. *Mewujudkan Kabupaten Nganjuk Layak Anak dan Responsif Gender*

Kebijakan operasional dalam menunjang perwujudan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Nganjuk, dalam Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023 direncanakan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

* **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
* **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

   Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 12.150.000, untuk jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 10.737.000, untuk jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah

- **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

   Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 3.486.885.000, untuk jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

   Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 167.688.000, untuk jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN

3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

   Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 3.630.000, untuk jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD

4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

   Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 3.630.000, untuk jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD

- **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

   Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 11.000.000, untuk jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan

- **Administrasi Umum Perangkat Daerah**

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

   Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 7.971.460, untuk jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerapan bangunan kantor yang disediakan

2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

   Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 124.806.600, untuk jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan

3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

   Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 35.438.910, untuk jumlah barang paket cetakan dan penggandaan yang disediakan

4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.800.000, untuk jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan

5. Fasilitasi Kunjungan Tamu

   Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 33.314.000, untuk jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu

6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

   Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 23.303.500, untuk jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

- **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

   Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 32.200.000, untuk jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan

- **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

   Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 2.000.000, untuk jumlah laporan penyediaan surat menyurat

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

   Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 144.000.000, untuk jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan

3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

   Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 75.000.000, untuk jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan

- **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

   Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 260.125.500, untuk jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan dan perizinannya

2. Pemeliharaan Mebel

   Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.004.400, untuk jumlah mebel yang dipelihara

3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

   Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 27.250.000, untuk jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara

4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

   Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 163.441.350, untuk jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi

B. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

- **Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota**

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang

   Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 18.061.800, untuk jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang

- **Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**

1. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

   Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 17.778.350, untuk jumlah orang yang mendapat peningkatan kapasitas pekerja sosial masyarakat kewenangan Kabupaten/ Kota

2. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota

   Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 276.382.200, untuk jumlah tenaga kesejahteraan sosial Kecamatan kewenangan Kabupaten/ Kota yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten/ Kota

3. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
   Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 15.418.400, untuk jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten/ Kota

C. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

- **Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**

1. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
   Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 42.856.800, untuk jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kewenangan Kabupaten/ Kota
2. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
   Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 766.000.000, untuk jumlah peserta bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat kewenangan Kabupaten/ Kota
3. pemberian layanan data dan pengaduan
   Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 7.384.295.750, jumlah orang yang mendapatkan layanan data dan pengaduan kewenangan Kabupaten/ Kota
4. Pemberian Layanan Kedaruratan
   Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 633.147.750, untuk jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan Kabupaten/ Kota

- **Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**

  1. Penyediaan Permakanan

     Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 174.745.250, untuk jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan Kabupaten/ Kota

  2. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial

     Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 201.394.950, untuk jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kewenangan Kabupaten/ Kota

  3. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga

     Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 10.000.000, untuk jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan Kabupaten/ Kota

  4. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/ Kota

     Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 786.260.000, untuk jumlah dokumen hasil koordinasi dan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial kewenangan Kabupaten/ Kota

D. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

- **Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**

  1. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

     Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 135.991.400, untuk jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin cackupan Daerah Kabupaten/ Kota

2. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

   Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 884.500.000, untuk jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapat bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan Kabupaten/ Kota

E. PROGRAM PENANGANAN BENCANA

- **Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**

1. Penyediaan Makanan

   Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 234.788.050n, untuk jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3x1 hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan Kabupaten/ Kota

F. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

- **Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota**

1. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota

   Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 54.524.900, untuk jumlah makam yang terpenuhi pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/ Kota

* **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
* **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

A. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

- **Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota**

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG

   Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 7.200.000, untuk jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) kewenangan Kabupaten/ Kota
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/ Kota

   Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 25.000.000, untuk jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) kewenangan Kabupaten/ Kota
3. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG

   Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 34.650.000, untuk jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/ Kota
4. Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG

   Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 8.000.000, untuk jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti sosialisasi kebijakan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/ Kota

- **Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota**
  1. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

     Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 8.200.000, untuk jumlah dokumen hasil sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi kewenangan Kabupaten/ Kota
  2. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

     Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 8.650.000, untuk jumlah organisasi masyarakat yang mendapat advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi kewenangan Kabupaten/ Kota
- **Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota**
  1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota

     Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 9.500.000, untuk jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/ Kota yang mendapat advokasi dan pendampingan
  2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota

     Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 40.800.000, untuk jumlah sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/ Kota yang mendapat peningkatan kapasitas

3. Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota

   Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 8.000.000, untuk jumlah dokumen Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/ Kota yang tersedia

B. PERLINDUNGAN PEREMPUAN

- **Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/ Kota**

1. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/ Kota

   Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 199.999.500, untuk jumlah perempuan korban kekerasan tingkat Kabupaten/ Kota yang mendapat layanan pengaduan

- **Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**

1. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota

   Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 18.724.100, untuk jumlah dokumen hasil penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan Kabupaten/ Kota

C. PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

- **Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**

  1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota

     Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 15.000.000, untuk Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

  2. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota

     Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 41.754.850, untuk Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia

  3. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota

     Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 15.000.000, untuk Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

- **Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**

  1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

     Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 14.999.800, untuk Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan

Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota

2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

   Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 14.999.900, untuk Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota

3. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

   Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 10.000.000, untuk Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

- **Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**

1. Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota

   Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 30.513.000, untuk Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia

D. PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

- **Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**

1. Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/ Kota

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 10.000.000, untuk Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia

2. Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/ Kota

   Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 7.530.000, untuk Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota

E. PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

- **Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota**

1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota

   Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 10.000.000, untuk Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha

2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota

   Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 75.446.500, untuk Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

- **Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota**

1. Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota

   Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 103.863.000, untuk Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

F. PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

- **Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota**

  1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota

     Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 9.810.700, untuk Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

- **Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**

  1. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

     Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 58.968.000, untuk Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota

  2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/ Kota

     Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 15.921.100, untuk Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota

3. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/ Kota

   Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 18.231.200, untuk Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota.

Tabel 8. T-C. 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kabupaten Nganjuk

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									**16.263.521.320**				**16.828.945.750**
X	**XX**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**		**100%**	**4.627.375.720**			**100%**	**4.720.170.000**
X	**XX**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja**		**100%**	**22.887.000**			**100%**	**14.873.000**
X	XX	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
X	XX	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
X	XX	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							
X	XX	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD							
X	XX	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD							

X	XX	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	12.150.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	6.655.000
X	XX	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Laporan	10.737.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	8.218.000
X	**XX**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang disusun**		**100%**	**3.661.833.000**			**100%**	**3.764.883.000**
X	XX	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	3.486.885.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	3.586.885.000
X	XX	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	167.688.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	168.638.000
X	XX	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
X	XX	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD							
X	XX	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	3.630.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	4.680.000
X	XX	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan							

X	XX	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17 Laporan	3.630.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	4.680.000
X	XX	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran							
X	**XX**	**1**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun**							
X	XX	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD							
X	XX	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD							
X	XX	1	2.03	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD							
X	XX	1	2.03	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD							
X	XX	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
X	XX	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							
X	XX	1	2.03	7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD							
X	**XX**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun**		**100%**	**11.000.000**			**100%**	**8.800.000**
X	XX	1	2.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai							
X	XX	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan							
X	XX	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian							

X	XX	1	2.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian								
X	XX	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai								
X	XX	1	2.05	8	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan								
X	XX	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 Orang	11.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	8.800.000
X	XX	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
X	**XX**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun**		**100%**	**226.634.470**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	**196.832.200**
X	XX	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Paket	7.971.460	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	10.750.700
X	XX	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan								
X	XX	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan								
X	XX	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Paket	124.806.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	93.375.950

X	XX	1	2.06	5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Paket	35.438.910	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	40.334.550
X	XX	1	2.06	6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	1.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	2.800.000
X	XX	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan							
X	XX	1	2.06	8	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	33.314.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	29.722.250
X	XX	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	23.303.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	19.848.750
X	XX	1	2.06	10	Jumlah arsip dinamis pada SKPD yang dikelola	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							
X	XX	1	2.06	11	Laporan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD yang disusun	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD							
X	**XX**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah barang milik daerah SKPD yang diadakan**		**100%**	**32.200.000,00**			**100%**	**34.500.000,00**
X	XX	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan							
X	XX	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan							

X	XX	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan							
X	XX	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Unit	32.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	34.500.000
X	XX	1	2.07	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan							
X	XX	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan							
X	XX	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan							
X	XX	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana GedunPendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan							
X	**XX**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia**		**100%**	**221.000.000**				**224.000.000**
X	XX	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	3.000.000
X	XX	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Laporan	144.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	145.000.000
X	XX	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan							

X	XX	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	76.000.000
X	**XX**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah barang milik daerah SKPD yang terawat**		**100%**	**451.821.250**			**100%**	**476.281.800**
X	XX	1	2.09	1	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya							
X	XX	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemelihaaraan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	27 Unit	260.125.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	251.298.100
X	XX	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Unit	1.004.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	2.000.000
X	XX	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	51 Unit	27.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	34.790.000
X	XX	1	2.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara							
X	XX	1	2.09	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara							
X	XX	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Unit	163.441.350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	188.193.700

X	XX	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasaranan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi							
X	XX	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi							
1	**6**	**4**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Terpenuhinya Rehabilitasi Sosial**		**87%**	**9.998.700.500**			**87%**	**10.463.887.950**
1	**6**	**4**	**2.01**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Jumlah orang yang terpenuhi kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial**		**87%**	**8.826.300.300**			**87%**	**9.312.500.600**
1	6	4	2.01	1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota							
1	6	4	2.01	2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota							
1	6	4	2.01	3	Penyediaan alat bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota							
1	6	4	2.01	4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota							
1	6	4	2.01	5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 Orang	42.856.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		**87%**	63.056.800

1	6	4	2.01	6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	420 Orang	766.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		**87%**	767.000.000
1	6	4	2.01	7	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Indentitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota							
1	6	4	2.01	8	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota							
1	6	4	2.01	9	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.068 Orang	7.384.295.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		**87%**	7.848.296.050
1	6	4	2.01	10	Pemberian layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Orang	633.147.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		**87%**	634.147.750
1	6	4	2.01	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota							
1	6	4	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota							
1	**6**	**4**	**2.02**		**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**Jumlah Orang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang tertangani**		**87%**	**1.172.400.200**			**87%**	**1.151.387.350**

1	6	4	2.02	1	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota							
1	6	4	2.02	2	Pemberian layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota							
1	6	4	2.02	3	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1000 Orang	174.745.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		**87%**	150.732.400
1	6	4	2.02	4	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota							
1	6	4	2.02	5	penyediaan alat bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota							
1	6	4	2.02	6	penyediaan perbekalan kesehatan di luar panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota							
1	6	4	2.02	7	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	155 Orang	201.394.950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		**87%**	202.394.950
1	6	4	2.02	8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota							

1	6	4	2.02	9	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Indentitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota							
1	6	4	2.02	10	Pemberiaan akses kelayanan pendidikan dan kesehatan dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota							
1	6	4	2.02	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota							
1	6	4	2.02	12	pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Orang	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		**87%**	11.000.000
1	6	4	2.02	13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota							
1	6	4	2.02	14	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21 Lembaga	786.260.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		**87%**	787.260.000
1	**6**	**5**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Jumlah anak-anak terlantar yang dijangkau, mendapat rujukan serta terpantau dan terpelihara**		**87%**	**1.020.491.400**			**87%**	**1.022.499.850**
1	**6**	**5**	**2.01**		**Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar**	**Terwujudnya Pemeliharaan Anak Terlantar**							
1	6	5	2.01	1	Penjangkauan anak-anak terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota							
1	6	5	2.01	2	Rujukan anak-anak terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota							

1	6	5	2.01	3	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota							
1	**6**	**5**	**2.02**		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Terwujudnya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**		**87%**	**1.020.491.400**			**87%**	**1.022.499.850**
1	6	5	2.02	1	Pendataan Fakir miskin cakupan daerah Kab/kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata							
1	6	5	2.02	2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	284 Keluarga	135.991.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		**87%**	136.999.850
1	6	5	2.02	3	Fasilitasi bantuan sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.166 Keluarga	884.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		**87%**	885.500.000
1	6	5	2.02	4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota							
1	**6**	**6**			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase Pelayanan PMKS**		**87%**	**234.788.050**			**87%**	**235.788.150**
1	**6**	**6**	**2.01**		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**Terwujudnya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**		**87%**	**234.788.050**			**87%**	**235.788.150**
1	6	6	2.01	1	Penyediaan makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55 Orang	234.788.050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		**87%**	235.788.150

1	6	6	2.01	2	Penyediaan sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota								
1	6	6	2.01	3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/ Kota								
1	6	6	2.01	4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/ Kota								
1	6	6	2.01	5	Pelayanan dukungan psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/ Kota								
1	**6**	**6**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**Terwujudnya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**								
1	6	6	2.02	1	Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota								
1	6	6	2.02	2	Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota								
1	**6**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase PSKS yang Aktif**		**85%**	**327.640.750**			**85%**	**334.599.800**
1	**6**	**2**	**2.02**		**Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota**		**85%**	**18.061.800**			**85%**	**25.335.500**
1	6	2	2.02	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	18.061.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		**85%**	25.335.500

1	**6**	**2**	**2.03**		**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Orang, Tenaga Kesejahteraan, Keluarga, Lembaga yang Meningkat Kapasitasnya serta Jumlah Sertifikat dari Hasil Peningkatan Jumlah Kapasitas**		**85%**	**309.578.950**			**85%**	**309.264.300**
1	6	2	2.03	1	Peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat kewenganan Kab/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 Orang	17.778.350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		**85%**	21.800.000
1	6	2	2.03	2	Peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kab/kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Orang	276.382.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		**85%**	265.078.300
1	6	2	2.03	3	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga kewenangan kab/kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota							
1	6	2	2.03	4	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kab/kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Lembaga	15.418.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		**85%**	22.386.000
1	6	2	2.03	5	Peningkatan kemampuan potensi sumber daya manusia dan penguatan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/ Kota							
1	**6**	**7**			**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Presentase Fasilitasi TMP**		**85%**	**54.524.900**			**85%**	**52.000.000**
1	**6**	**7**	**2.01**		**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota**	**Terwujudnya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota**		**85%**	**54.524.900**			**85%**	**52.000.000**

1	6	7	2.01	1	Rehabilitasi sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota								
1	6	7	2.01	2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Makam	54.524.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		**85%**	52.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									**820.761.650**				**632.938.250**	
2	**8**	**2**			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Terwujudnya Keadilan dan Kesetaraan Gender**		**100%**	**150.000.000**			**100%**	**158.000.000**	
2	**8**	**2**	**2.01**		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Terwujudnya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**		**100%**	**74.850.000**			**100%**	**77.850.000**	
2	8	2	2.01	1	Koordinasi dan singkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	7.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		**100%**	8.200.000	
2	8	2	2.01	2	Koordinasi dan singkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		**100%**	26.000.000	

2	8	2	2.01	3	Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52 Perangkat Daerah	34.650.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		**100%**	34.650.000
2	8	2	2.01	4	Sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52 Perangkat Daerah	8.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		**100%**	9.000.000
2	**8**	**2**	**2.02**		**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**		**100%**	**16.850.000**			**100%**	**18.850.000**
2	8	2	2.02	1	Sosialisasi Peningkatan Partiasipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	8.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		**100%**	9.200.000
2	8	2	2.02	2	Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial dan ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Organisasi	8.650.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		**100%**	9.650.000
2	**8**	**2**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Terbentuknya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Terlaksananya Workshop bagi Organisasi Perempuan, Lembaga Masyarakat dan Perguruan Tinggi**		**100%**	**58.300.000**			**100%**	**61.300.000**

2	8	2	2.03	1	Advokasi kebijakan dan pendampingan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kab/kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Lembaga	9.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		**100%**	10.500.000
2	8	2	2.03	2	Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.912 Orang	40.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		**100%**	41.800.000
2	8	2	2.03	3	Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan kab/kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Dokumen	8.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		**100%**	9.000.000
2	**8**	**4**			**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak Tingkat Daerah/Kota** **Terwujudnya Peningkatan Kualitas Keluarga**		**100%**	**142.267.550**			**100%**	**148.267.550**
2	**8**	**4**	**2.01**		**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesejahteraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya Persentase Keluarga yang melaksanakan pendidikan Kesetaraan Gender dalam Keluarga**		**100%**	**71.754.850**			**100%**	**74.754.850**
2	8	4	2.01	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52 Perangkat Daerah	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		**100%**	16.000.000
2	8	4	2.01	2	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	41.754.850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		**100%**	42.754.850

2	8	4	2.01	3	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		**100%**	16.000.000
2	**8**	**4**	**2.02**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah**	**Jumlah penguatan dan pengambangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten**		**100%**	**39.999.700**			**100%**	**41.999.700**
2	8	4	2.02	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Lembaga	14.999.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		**100%**	15.999.800
2	8	4	2.02	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Orang	14.999.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		**100%**	15.999.900
2	8	4	2.02	3	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		**100%**	10.000.000
2	**8**	**4**	**2.03**		**Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**100%**	**30.513.000**			**100%**	**31.513.000**
2	8	4	2.03	1	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Layanan	30.513.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		**100%**	31.513.000

2	**8**	**5**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Persentasi OPD yang Memanfaatkan Data Gender dan Anak**		**100%**	**17.530.000**			**100%**	**19.530.000**
2	**8**	**5**	**2.01**		**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Perangkat Daerah yang memasukkan Data Gender dan Anak dalam Aplikasi** **Jumlah Data Gender dan Anak Bahan Analisis dan Penyajian Data**		**100%**	**17.530.000**			**100%**	**19.530.000**
2	8	5	2.01	1	Penyediaan Data Gender dan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52 Dokumen	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		**100%**	11.000.000
2	8	5	2.01	2	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	7.530.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		**100%**	8.530.000
2	**8**	**6**			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Meningkatnya Kualitas Hidup Anak**		**100%**	**189.309.500**			**100%**	**193.885.600**
2	**8**	**6**	**2.01**		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah koordinasi dan sinkronisasi Pelembagaan Gugus Tugas Kabupaten dan Jumlah Penguatan Kecamatan Layak Anak**		**100%**	**85.446.500**			**100%**	**89.000.000**
2	8	6	2.01	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14 Organisasi	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		**100%**	11.000.000
2	8	6	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Organisasi	75.446.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		**100%**	78.000.000

2	**8**	**6**	**2.02**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Kelembagaan KLA serta Peningkatan Pemenuhan Hak Anak**		**100%**	**103.863.000**			**100%**	**104.885.600**
2	8	6	2.02	1	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Orang	103.863.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		**100%**	104.885.600
2	8	6	2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota							
2	8	6	2.02	3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota							
2	8	6	2.02	4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota							
2	**8**	**7**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Meningkatnya Kualitas Hidup Anak**		**100%**	**102.931.000**			**100%**	**106.931.000**
2	**8**	**7**	**2.01**		**Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Fasilitasi Pencegahan dan Penanganan Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi**		**100%**	**9.810.700**			**100%**	**11.750.000**
2	8	7	2.01	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Perangkat Daerah	9.810.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		**100%**	11.750.000

2	8	7	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota							
2	**8**	**7**	**2.02**		**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Fasilitasi Pencegahan dan Penanganan Anak Korban Kekerasan , Eksploitasi serta penguatan Kelembagaan KLA,Fasilitasi Pemenuhan Hak Anak atas Informasi Layak Anak, Fasilitasi Pencegahan dan Penanganan Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi**		**100%**	**93.120.300**			**100%**	**95.181.000**
2	8	7	2.02	1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Orang	58.968.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		**100%**	49.750.000
2	8	7	2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150 Layanan	15.921.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		**100%**	20.830.000
2	8	7	2.02	3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota							
2	8	7	2.02	4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen	18.231.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		**100%**	24.601.000

2	**8**	**7**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyedia Sarana dan Prasarana serta Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perindungan Khusus**								
2	8	7	2.03	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota								
2	8	7	2.03	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota								
2	8	7	2.03	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota								
2	**8**	**3**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan**		**100%**	**218.723.600**			**100%**	**6.324.100**
2	**8**	**3**	**2.01**		**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Hasil Kooordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota** **Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota**								

2	8	3	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota							
2	8	3	2.01	2	Advokasi Kebijakan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota							
2	**8**	**3**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Perempuan Korban Kekerasan terhadap Kabupaten/ Kota yang Mendapat Layanan Pengaduan dan Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi**		**100%**	**199.999.500**			**100%**	**3.000.000**
2	8	3	2.02	1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 Orang	199.999.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		**100%**	3.000.000
2	8	3	2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota							
2	**8**	**3**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana dan Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan** **Jumlah Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas**		**100%**	**18.724.100**			**100%**	**3.324.100**

						Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Mendapat Pemenuhan Kebutuhan Spesifik **Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan**							
2	8	3	2.03	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota							
2	8	3	2.03	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas							
2	8	3	2.03	3	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik							
2	8	3	2.03	4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	18.724.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		**100%**	3.324.100
									17.084.282.970				**17.461.884.000**

4.3 Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Khusus

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jenis Belanja	Sasaran Penerima Manfaat			Sumber Pendanaan
			Nama Objek	Jumlah (Orang /Lembaga)	Rincian (Rp)	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**					
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial					
1.1	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Bantuan Sosial	Lansia	4068	7.322.400.000	APBD
1.2	Pemberian Layanan Kedaruratan	Belanja Hibah	PMI	1	400.000.000	APBD
1.3	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Belanja Hibah	Disabilitas	420	756.000.000	

	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial					
1.4	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Belanja Hibah	Bantuan sosial LKSA	21	782.100.000	APBD
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					
1.5	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Belanja Hibah	Siswa Miskin (SMK/SMA/MA)	1166	874.500.000	APBD

BAB V
PENUTUP

5.1. Catatan Penting

Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Agar pelaksanaan pembangunan bisa memperoleh hasil yang maksimal khususnya yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maka harus sesuai peraturan perundang undangan, tetap mengacu pada dokumen perencanaan yang ada, memperhatikan sinergitas antar bidang dan antar sektor, serta rasa dedikasi dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Sehubungan dengan terbitnya Permendagri 86 Tahun 2017, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 sebagai berikut:

a. Di dalam Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 memerlukan waktu, dikarenakan harus menyesuaikan dengan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021.

b. Di dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 masih belum sempurna, terkait dengan terbitnya Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 memerlukan pemahaman terkait indikator dan satuan target yang sudah ditentukan.
c. Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program, kegiatan dan sub kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi Jawa Timur maupun yang bersumber dari APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya, dan Visi Misi Kepala Daerah terpilih.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

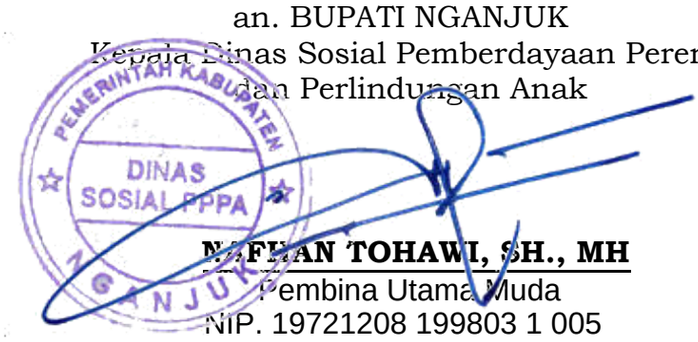
a. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin komplek. Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
b. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna.

c. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.

d. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah ditetapkan.

Nganjuk,

an. BUPATI NGANJUK
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



NAFIAN TOHAWI, SH., MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19721208 199803 1 005